

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pemenuhan hak politik khususnya hak untuk dapat berpartisipasi memilih pemimpinnya dalam pemilihan umum. Peneliti mencoba untuk meneliti secara lebih mendalam terkait dengan pemenuhan hak politik pasien rehabilitasi narkoba yang rentan terhadap gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa. Pemenuhan hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia tersebut sebagai konsekuensi pasti bagi negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara demokrasi. Penelitian ini dilakukan di Pondok Remaja Inabah XII Cihaurbeuti, Ciamis. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu pasien rehabilitasi, pengurus pondok rehabilitasi, dan Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak penyelenggara pemilihan umum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan pengumpulan data. Hasil penelitian ini yaitu, *Pertama*, masih adanya pengabaian dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak untuk memilih terutama bagi penyandang disabilitas mental dan/atau orang dengan gangguan jiwa. *Kedua*, pemenuhan hak politik pasien rehabilitasi narkoba yang dikategorikan ke dalam penyandang disabilitas mental dan/atau orang dengan gangguan jiwa di Pondok Remaja Inabah XVIII belum terpenuhi.

Dalam hal ini tersiratkan negara telah gagal menjalankan fungsinya sebagai entitas utama yang bertanggungjawab melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia warga negaranya tanpa adanya diskriminasi termasuk bagi para penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Para pasien rehabilitasi narkoba yang di kategorikan sebagai penyandang disabilitas mental atau ODGJ ini kehilangan akses untuk dapat menjangkau para elit. Realita yang terjadi menunjukkan pasien rehabilitasi sebagai bagian dari subaltern, yakni masyarakat atau rakyat yang termarginalkan.

Kata kunci: Hak Politik, Orang dengan Gangguan Jiwa, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Subaltern

ABSTRACT

This study aims to investigate the fulfillment of political rights, especially the right to be able to participate in electing its leaders in elections. Researchers try to examine more closely related to the fulfillment of political rights of drug rehabilitation patients who are vulnerable to mental disorders or people with mental disorders. The fulfillment of political rights as part of human rights is a definite consequence for a state that upholds the principles of a democratic state. This research was conducted at Pondok Remaja Inabah XII Cihaurbeuti, Ciamis. Research subjects in this study were rehabilitation patients, rehabilitation board administrators, and the Komisi Pemilihan Umum as the organizer of the general election.

This research uses descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection techniques using observation techniques, interviews, and documentation studies with data validity techniques using triangulation of data sources and data collection. The results of this study are, First, there is still discrimination in the fulfillment of human rights, especially the right to vote, especially for persons with mental disabilities and / or people with mental disorders. Second, the fulfillment of the political rights of drug rehabilitation patients who in this case are categorized as persons with mental disabilities and / or persons with mental disorders at Pondok Remaja Inabah XVIII has not been fulfilled.

In this case, this implies that the state has failed to carry out its function as the main entity responsible for protecting, upholding and advancing the human rights of its citizens without discrimination, including for persons with mental disabilities or people with mental disorders (ODGJ). These drug rehabilitation patients who are categorized as people with mental disabilities or ODGJ lose access to being able to reach the elite. The reality that occurs shows that rehabilitation patients are part of the subaltern, namely the marginalized community or people.

Keywords: Political Rights, People with Mental Disorders, Democracy and Human Rights, Subaltern